

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI  
(*DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*);
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan undang-undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang - Undang tentang Pengesahan

Persetujuan ...

Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*);

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI (*DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia.

(2) Salinan ...

- (2) Salinan naskah asli Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI  
(*DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diwujudkan dalam bentuk Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2014 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi muatan dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi antara lain:

1. Bidang dan lingkup kerja sama, meliputi:
  - a. dialog strategis;

b. pertukaran ...

- b. pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan;
  - c. pendidikan dan pelatihan militer;
  - d. industri pertahanan: mengembangkan kerja sama di bidang teknologi pertahanan, termasuk penelitian bersama, produksi, pemasaran dan alih teknologi;
  - e. bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik;
  - f. bidang kerja sama militer lain yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Pembentukan Komisi Militer Bersama yang bertanggung jawab mengembangkan kerja sama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan.
  3. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
  4. Perlindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.
  5. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak.
  6. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui konsultasi di antara Para Pihak. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran pelaksanaan Persetujuan ini maka dalam waktu 90 hari melalui perundingan oleh Komisi Militer Bersama atau melalui metode lain yang disepakati Para Pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan, salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan atau membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.



**REPUBLIK INDONESIA**

**PERSETUJUAN KERJASAMA PERTAHANAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (yang selanjutnya disebut Para Pihak);

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang baik antara Para Pihak melalui kerjasama pertahanan yang kokoh;

Mendorong perdamaian dan stabilitas internasional dengan melaksanakan Persetujuan ini dan sesuai dengan kebijakan nasional dan internasional masing-masing, dan tidak bertentangan dengan undang-undang nasional dan komitmen-komitmen internasional dari masing-masing Pihak;

Sepanjang tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan dan keamanan kesatuan wilayah masing-masing atau negara lain;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1  
Tujuan**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membangun kerjasama militer dan memperkuat hubungan persahabatan militer Para Pihak di bidang pertahanan, dan untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan, resiprositas dan kepentingan bersama.

## **Pasal 2** **Bidang dan Lingkup Kerjasama**

Bidang dan lingkup kerjasama pertahanan antara kedua negara berupa hal-hal berikut:

1. Dialog strategis pertahanan: untuk mengembangkan pertukaran pandangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan;
2. Pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan: meliputi pertukaran informasi, pelatihan, simposium dan kunjungan belajar;
3. Pendidikan dan pelatihan militer: meliputi pelatihan, kunjungan belajar, pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pertukaran personel dan tenaga ahli pertahanan untuk pendidikan dan penyelenggaraan lokakarya, seminar dan pelatihan profesional antara para peserta atas dasar timbal balik.
4. Industri pertahanan: mengembangkan kerjasama di bidang teknologi pertahanan, termasuk penelitian bersama, produksi, pemasaran dan alih teknologi.
5. Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik: meliputi pengembangan dan peningkatan kerjasama di bidang bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dukungan logistik militer dan pelayanan medis; dan
6. Bidang kerjasama militer lain yang disepakati oleh Para Pihak.

## **Pasal 3** **Otoritas Yang Berwenang**

Otoritas yang berwenang yang dipercayakan untuk melaksanakan Persetujuan ini adalah:

1. Untuk Pihak Arab Saudi (Kementerian Pertahanan); dan
2. Untuk Pihak Indonesia (Kementerian Pertahanan).

## **Pasal 4** **Komisi Militer**

Komisi dengan nama (Komisi Militer Bersama) akan bertanggungjawab mengembangkan kerjasama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan ini. Komisi dapat membentuk satuan tugas khusus bersama dari Para Pihak untuk melayani bidang kerjasama militer. Setiap Pihak selanjutnya menunjuk perwakilannya dalam Komisi. Komisi mengadakan pertemuan sesuai keperluan dan atas permintaan salah satu Pihak, dan menyerahkan rekomendasinya kepada otoritas yang berwenang di kedua negara guna memperoleh persetujuan.

**Pasal 5**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

1. Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini menjadi milik bersama.
2. Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan informasi mengenai hak kekayaan intelektual yang timbul dari kerjasama berdasarkan Persetujuan ini kepada pihak ketiga manapun, wajib memperoleh persetujuan sebelumnya dari Pihak lain.
3. Setiap Pihak memperoleh bagian yang sama dari pendapatan komersil, bilamana kekayaan intelektual dipergunakan untuk tujuan komersil.

**Pasal 6**  
**Perlindungan Keamanan Informasi**

1. Para Pihak wajib melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diperoleh dari Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari kedua Pihak.
2. Informasi dan perlengkapan rahasia akan diberikan melalui saluran resmi yang disepakati oleh ketua dari masing-masing pihak dalam Komisi Bersama. Informasi dan perlengkapan ini akan ditandai sesuai tingkat klasifikasinya dan negara asal sebagai berikut :

KERAJAAN ARAB SAUDI		REPUBLIK INDONESIA	
سري للغاية	TOP SECRET	SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
سري	SECRET	RAHASIA	SECRET
محظور	CONFIDENTIAL	TERBATAS	CONFIDENTIAL
		BIASA	UNCLASSIFIED

3. Tidak diperkenankan untuk mentransfer, mengungkap atau mengeluarkan informasi atau perlengkapan yang diterima dalam rangka Persetujuan ini secara langsung atau tidak langsung, sementara atau secara permanen kepada pihak ketiga, baik itu perorangan atau lembaga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak asal.

**Pasal 7**  
**Urusan Keuangan**

1. Penandatanganan Persetujuan ini tidak berakibat adanya kewajiban keuangan apapun terhadap tiap-tiap Pihak.
2. Pembiayaan kunjungan, pertemuan dan kegiatan yang timbul dari Persetujuan ini dibiayai sebagai berikut :
  - a. Pihak tamu menanggung biaya perjalanan (perjalanan pulang pergi) personelnnya kenegara Pihak lain.
  - b. Pihak tuan rumah menanggung seluruh biaya transportasi personel dari Pihak tamu dalam wilayah negara Pihak tuan rumah serta akomodasi dan konsumsi.
  - c. Pihak tuan rumah menanggung biaya pengobatan medis darurat bagi personel Pihak tamu.
  - d. Pihak tamu menanggung biaya pemindahan atau evakuasi medis bagi personelnnya yang meninggal dunia atau terluka dari negara Pihak tuan rumah.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Setiap perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini diselesaikan melalui konsultasi hanya di antara Para Pihak, tanpa membawa kepengadilan nasional atau internasional, atau pihak ketiga.
2. Dalam hal perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak mencari penyelesaian dalam waktu 90 hari melalui perundingan yang dilakukan oleh komisi yang dibentuk oleh kedua Pihak atau melalui metode lain yang disepakati Para Pihak.
3. Perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diminta oleh salah satu Pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) Pasal, salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini atau membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.

**Pasal 9**  
**Pemberlakuan, Durasi dan Pengakhiran**

1. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir, dimana masing-masing Pihak memberitahukan Pihak lain, melalui saluran diplomatik, perihal selesainya prosedur internal dan hukum yang diperlukan bagi berlakunya Persetujuan ini;



2. Persetujuan ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya, dan diperbaharui secara otomatis untuk periode-periode berikutnya masing-masing selama satu tahun, kecuali salah satu Pihak meminta pengakhiran Persetujuan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 90 hari sebelum berakhirnya waktu yang telah ditetapkan.
3. Pengakhiran atau penundaan Persetujuan ini, sesuai ayat (2) Pasal ini atau ayat (3) Pasal 8, tidak berdampak pada penyelesaian program-program kerjasama dan kegiatan yang disepakati, kecuali Para Pihak menyepakati lain.

### **Pasal 10 Amandemen dan Peninjauan**

Masing-masing Pihak dapat mengusulkan amandemen terhadap Persetujuan ini melalui permohonan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik kepada Pihak lain; perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 90 hari, maka kedua Pihak dapat mengakhiri Persetujuan melalui pemberitahuan tertulis dalam waktu 90 hari.

Amandemen yang disepakati akan mulai berlaku sesuai dengan prosedur sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Persetujuan ini.

### **Pasal 11 Bahasa dan Tandatanganan**

Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris, semua tiga naskah tersebut memiliki keotentikan yang sama. Dalam hal perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Persetujuan ini ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 / 03 /1435H. Bertepatan tanggal 23 / 01 /2014M.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**



**SJAFRIE SJAMSOEDDIN  
WAKIL MENTERI PERTAHANAN**

**UNTUK PEMERINTAH  
KERAJAAN ARAB SAUDI**



**SALMAN BIN SULTAN BIN ABDULAZIZ  
WAKIL MENTERI PERTAHANAN**



## REPUBLIK INDONESIA

إن حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة المملكة العربية السعودية (المشار إليهما لاحقاً بالطرفين) : رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة الجيدة بينهما من خلال التعاون الدفاعي الوثيق وتشجيعاً للسلام والاستقرار الدولي بتطبيق هذه الاتفاقية وبما يتوافق والسياسات الوطنية والدولية لكل منهما ولا يتعارض مع القانون المحلي ولا مع الالتزامات الدولية لطرفيها ، وعلى ألا تستخدم ضد مصالح وأمن الوحدة الإقليمية لأي منهما أو الدول الأخرى.

قد اتفقتا على الآتي :

### المادة الأولى الغرض

الغرض من هذه الاتفاقية هو تطوير التعاون العسكري وتعزيز الروابط العسكرية الودية بين الطرفين في مجال الدفاع وتطبيق هذا التعاون وفقاً لمبادئ المساواة ، والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة.

### المادة الثانية مجال ونطاق التعاون

يتمثل مجال ونطاق التعاون الدفاعي بين البلدين في الآتي :

1. الحوار الاستراتيجي الدفاعي : لتعزيز تبادل وجهات النظر في الأمور المتعلقة بالأمن والدفاع .
2. تبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال الدفاع : ويشمل تبادل المعلومات والتدريب والندوات والزيارات الدراسية .
3. التعليم والتدريب العسكري : ويشمل التدريب والزيارات الدراسية وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية وتبادل الأفراد والخبراء الدفاعيين للتعليم وعقد ورش العمل والندوات والتدريب المهني بين المشاركين على أساس متبادل .
4. الصناعات الدفاعية : تطوير التعاون في مجال التقنيات الدفاعية ، التي تشمل : البحوث المشتركة والإنتاج والتسويق ونقل التقنية .
5. المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وحفظ السلام والخدمات اللوجستية : ويشمل تطوير وتعزيز التعاون في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وحفظ السلام والدعم اللوجستي العسكري والخدمات الطبية .
6. أي مجال تعاون عسكري آخر يقره الطرفان لاحقاً .

١٠/١٠/١٠

### المادة الثالثة

#### السلطات المختصة

السلطات المختصة المنوط بها تنفيذ هذه الاتفاقية هي :

1. من الجانب السعودي ( وزارة الدفاع ) .
2. من الجانب الإندونيسي ( وزارة الدفاع ) .

### المادة الرابعة

#### اللجنة العسكرية

تشكل لجنة تسمى ( اللجنة العسكرية المشتركة ) تكون مسؤولة عن متابعة التعاون العسكري بين الطرفين وتطويره وتذليل أي عائق يطرأ على تنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية . وللجنة أن تشكل فرق عمل مختصة مشتركة من كلا الطرفين لخدمة مجالات التعاون العسكري ، ويحدد كل طرف من يمثله في هذه اللجنة في وقت لاحق .  
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحسب الحاجة وبناء على طلب أحد الطرفين ، وترفع توصياتها إلى السلطات المختصة في البلدين لأخذ الموافقة .

### المادة الخامسة

#### حقوق الملكية الفكرية

1. يوافق الطرفان على أن أي ملكية فكرية ناشئة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية تكون ملكاً مشتركاً.
2. في حال رغبة أي من الطرفين الكشف عن المعلومات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الناجمة عن التعاون بموجب هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث ، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر .
3. يحصل الطرفان على حصة متساوية من العائدات التجارية في حال استخدام الملكية الفكرية لأغراض تجارية .

المادة السادسة  
حماية أمن المعلومات

1. على الطرفين حماية سرية المعلومات التي يمكنهم الوصول إليها ضمن إطار هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية على حد سواء .
2. يكون توفر المعلومات والمعدات السرية من خلال القنوات الرسمية التي يتفق عليها رئيسا الجانبين في اللجنة المشتركة . ويشار إلى هذه المعلومات والمعدات وفقاً لمستوى تصنيفها وبلد المنشأ على النحو التالي :

جمهورية إندونيسيا		المملكة العربية السعودية	
SANGAT RAHASIA	TOP SECRET	TOP SECRET	سري للغاية
RAHASIA	SECRET	SECRET	سري
TERBATAS	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL	محظور
BIASA	UNCLASSIFIED		

3. لا يجوز نقل وكشف أو اصدار أي من المعلومات أو المعدات المتسلمة ضمن إطار هذه الاتفاقية بشكل مباشر أو غير مباشر مؤقتاً أو بشكل دائم إلى طرف ثالث سواء كان شخصاً أو هيئة دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المنشئ .

المادة السابعة  
الشنون المالية

1. لا يترتب على توقيع هذه الاتفاقية أي التزام مالي على أي من الطرفين .
2. يكون تمويل نفقات الزيارات والاجتماعات والانشطة المنبثقة على هذه الاتفاقية وفقاً لما يأتي :
- أ. يتحمل الطرف المدعو جميع نفقات سفر منسوبيه ذهاباً وإياباً إلى بلد الطرف الآخر.

- ب. يتحمل الطرف المضيف جميع المصروفات المتعلقة بتنقل منسوبي الطرف المدعو داخل بلد الطرف المضيف مع تأمين السكن والإعاشة .
- ج. يتحمل الطرف المضيف نفقات العلاج الطبي الطارئ لمنسوبي الطرف المدعو .
- د. يتحمل الطرف المدعو النفقات المتعلقة بالترحيل والإخلاء الطبي للمتوفين والمصابين من منسوبيه في بلد الطرف المضيف .

### المادة الثامنة

#### تسوية الخلافات

1. أي اختلاف يتعلق بتفسير مواد هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل عن طريق التشاور بين الطرفين فقط ، دون اللجوء إلى محكمة محلية أو دولية أو طرف ثالث للتسوية .
2. يلتزم الطرفان عند نشوب أي خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالبحث عن حل لتسوية النزاع خلال مدة (90) يوماً عن طريق المفاوضات التي تجريها لجنة مشكلة من الطرفين أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان .
3. يكون البدء في المفاوضات خلال (30) يوماً من طلب ذلك من أي من الطرفين ، وإذا لم يتوصل إلى نتيجة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة لتسوية أي نزاع فإنه يحق لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية أو ( إيقاف العمل بالمادة المختلف عليها ) .

### المادة التاسعة

#### السريان والمدة والإنهاء

1. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ آخر إشعار مكتوب يُعلم من خلاله كل طرف الآخر
- عبر القنوات الدبلوماسية - عن إنهاء الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز السريان .
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء سريانها ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد متعاقبة ، مدة كل منها سنة ، ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار خطي موجه للطرف الآخر قبل (90) يوماً من الوقت المحدد للانتهاء .
3. لا يؤثر إنهاء أو تعليق هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة ، أو الفقرة (3) من المادة ( الثامنة ) ، على إكمال برامج التعاون والأنشطة الملتمزم بها ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

المادة العاشرة  
التعديل والمراجعة

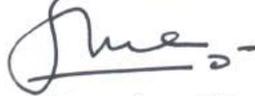
يجوز لأي طرف أن يقترح التعديلات التي يراها على هذه الاتفاقية ، وذلك بطلب مكتوب يوجه بالطرق الدبلوماسية للطرف الآخر وتبدأ المفاوضات خلال (30) يوماً من تسلم الطلب، وإذا لم يتوصل إلى نتيجة خلال (90) يوماً فإنه يجوز لكل طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإرسال إشعار خطي في غضون (90) يوماً .  
وتوضع التعديلات المتفق عليها موضع التنفيذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه الاتفاقية .

المادة الحادية عشر  
النص والإمضاء

حررت هذه الاتفاقية باللغات : العربية , والإندونيسية , والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية ، وعند الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح .  
وقعت هذه الاتفاقية في ( جاكرتا ) يوم ( الخميس ) بتاريخ ( 22 \ 3 \ 1435 هـ ) الموافق ( 23 \ 1 \ 2014 م).

عن حكومة

جمهورية إندونيسيا



شفري شمس الدين

نائب وزير الدفاع

عن حكومة

المملكة العربية السعودية



سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

نائب وزير الدفاع



**REPUBLIK INDONESIA**

**DEFENSE COOPERATION AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia (hereinafter referred to as the Parties);

Desirous to strengthen the good friendship relations between them through solid defense cooperation;

Promoting international peace and stability in implementing this Agreement and in accordance with national and international policies of each Party and without prejudice to domestic laws and international commitments of each Party;

Provided it shall not be used against the interests and security of regional unity of either Party or of other states;

**Have agreed to the following:**

**Article 1  
Purpose**

The purpose of this Agreement is to develop military cooperation and reinforce cordial military ties between the Parties in the field of defense, and to implement this cooperation in accordance with principles of equality, reciprocity and common interest.

**Article 2  
Field and Scope of Cooperation**

The field and scope of cooperation between the two countries shall be in the form of:

1. Strategic defense dialogue: to expand the exchange of views on defense and security matters;
2. Exchange of intelligence information in the field of defense: this includes exchange of information, training, symposia and study visits;

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

3. Military education and training: this includes training, study visits, development of educational and training programs and exchange of defense personnel and experts to teach, set up workshops and symposia and provide professional training among participants on a reciprocal basis;
4. Defense industry: develop cooperation in defense technologies, including: joint research, production, marketing and transfer of technology;
5. Humanitarian aid, disaster relief, peace-keeping and logistic services: this includes developing and improving cooperation in the area of humanitarian aid, disaster relief, peace-keeping, military logistic support and medical services; and
6. Any other area of military cooperation to be agreed upon by the Parties.

### **Article 3 Competent Authorities**

The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are:

1. For Saudi Arabia (Ministry of Defense); and
2. For Indonesia (Ministry of Defense).

### **Article 4 Military Committee**

A committee named (Joint Military Committee) shall be in charge of developing military cooperation between the Parties and overcome any obstacle to the implementation of this Agreement. The Committee may form joint special taskforces from both Parties to serve military cooperation areas. Each Party shall subsequently designate its representative(s) in the Committee. The Committee shall convene as necessary and upon a request by either Party, and shall submit its recommendations to competent authorities of both countries for approval.

### **Article 5 Intellectual Property Rights**

1. The Parties agree that any intellectual property resulting from implementing this Agreement shall be common property.
2. In case either Party seeks to disclose information pertaining to intellectual property rights arising from cooperation under this Agreement to any third party, a prior consent from the other Party must be obtained.
3. Each Party shall receive an equal share of commercial return if intellectual property is used for commercial purposes.

**Article 6**  
**Information Security Protection**

1. The Parties shall protect confidentiality of information accessible under this Agreement according to national laws and regulations of both Parties.
2. Secret information and equipment shall be provided through official channels agreed upon by heads of both sides in the Joint Committee. Said information and equipment shall be referred to according to level of classification and country of origin as follows:

KINGDOM OF SAUDI ARABIA		REPUBLIC OF INDONESIA	
TOP SECRET	سري للغاية	SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
SECRET	سري	RAHASIA	SECRET
CONFIDENTIAL	محظور	TERBATAS	CONFIDENTIAL
		BIASA	UNCLASSIFIED

3. No information or equipment received under this Agreement may directly or indirectly, temporarily or permanently - be transferred, disclosed or issued to a third party, whether a person or agency, without a prior written consent of the originating Party.

**Article 7**  
**Financial Affairs**

1. Signing of this Agreement shall not entail any financial obligation on either Party.
2. Expenses of visits, meetings and activities related to this Agreement shall be borne as follows:
  - a. The visiting Party shall bear all travel expenses (roundtrip flights) of its personnel to the country of the other Party.
  - b. The hosting Party shall bear all expenses related to transportation of personnel of the visiting Party within the country of the hosting Party as well as room and board.
  - c. The hosting Party shall bear expenses of emergency medical treatment for personnel of the visiting Party.
  - d. The visiting Party shall bear expenses related to transfer or medical evacuation of its deceased or injured personnel from the country of the hosting Party.

**Article 8  
Settlement of Disputes**

1. Any difference in interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through consultation between the Parties only, without recourse to national or international courts or to a third party.
2. In case of difference in interpretation or implementation of this Agreement, the Parties shall seek settlement within (90) days through negotiations conducted by a committee to be formed of both Parties or through any other method agreed upon by the Parties.
3. Negotiations shall commence within (30) days upon a request by either Party. Should no agreement be reached within the period specified in paragraph (2) of this Article, either Party may terminate this Agreement or (annul the disputed article(s)).

**Article 9  
Effectiveness, Term and Termination**

1. This Agreement shall be effective as of the date of the last written notification in which each Party notifies the other Party, through diplomatic channels, of finalization of internal and legal procedures required for effectiveness of the Agreement.
2. This Agreement shall be valid for a period of five years as of the date of effectiveness, and shall be automatically renewed for consecutive period(s); each being one year, unless either Party requests termination of the Agreement by a written notification submitted to the other Party (90) days prior to the specified date of termination.
3. Termination or suspension of this Agreement, as per paragraph (2) of this Article or paragraph (3) of Article (8), shall not affect completion of binding cooperation programs and activities, unless the Parties agree otherwise.

**Article 10  
Amendment and Revision**

Either Party may propose amendments to this Agreement by a written request transmitted through diplomatic channels to the other Party; negotiations shall commence within (30) days from receipt of the request. Should no agreement be reached within (90) days, both Parties may terminate this Agreement by a written notification within (90) days.

Agreed amendments shall take effect pursuant to procedures provided for in Article (9) of this Agreement.

**Article 11  
Language and Signature**

This Agreement is drafted in: Arabic, Indonesian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Signed in (Jakarta) on (Thursday) dated 22/3/1435H, corresponding to 23/1/2014.

**FOR THE GOVERNMENT  
REPUBLIC OF INDONESIA**



**SJAFRIE SJAMSOEDDIN  
VICE MINISTER OF DEFENCE**

**FOR THE GOVERNMENT  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA**



**SALMAN BIN SULTAN BIN ABDULAZIZ  
DEPUTY MINISTER OF DEFENSE**